

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan data, strategi pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan pada teori inti strategi Richard P. Rumelt. Disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pelaksanaan strategi dalam upaya pemulihan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan dengan baik, namun ada beberapa kekurangan sehingga strategi yang telah dilakukan belum berjalan optimal.

Secara diagnosis diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah memberikan penjelasan dan mengidentifikasi situasi, selain itu juga memberikan perhatian untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Diagnosis situasi yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah penyebab dari kejadian bencana, dan dampak yang ditimbulkan. Maka dari itu upaya yang dilakukan seperti pemberian dana siap pakai untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan rumah masyarakat. Sedangkan

tantangan yaitu dalam pelaksanaan tidak adanya dokumen kajian risiko bencana pada bencana banjir dan tanah longsor. Untuk stimulan rumah masyarakat, banyak masyarakat yang belum memenuhi persyaratan yang diminta sehingga dana bantuan masi ter blokir di rekening.

Pada kebijakan penuntun dalam upaya pemulihan bencana, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan peraturan dari BNPB dan Kepala Daerah. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan tidak bisa membuat kebijakan, karena pemulihan ini sifatnya dari pusat selain itu untuk pengerjaan rehabilitasi dan rekontruksi harus mengikuti peraturan yang telah ada dari dulunya. Maka dari itu fokus dari kebijakan penuntun ini adalah aturan-aturan apa yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemulihan bencana. Kebijakan penuntun memiliki keuntungan seperti bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang benar, karena dalam pembangunan kembali perhidupan masyarakat tidak bisa asal-asalan tanpa ada kebijakan dan pedoman yang pasti. Terakhir ada tindakan koheren yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya pemulihan bencana. Adapun tindakan yang dilakukan seperti pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Dalam melakukan tindakan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial, TNI, POLRI, Kecamatan, Nagari, dan lainnya. Tindakan yang dilakukan telah dapat terkoordinasi dengan baik.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meminimalisir dampak bencana dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Temuan ini dapat menjadi dasar

bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, seperti penegakan regulasi terkait pemulihan bencana yang dilakukan. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru terhadap proses pemulihan bencana, terutama terkait rehabilitasi dan rekontruksi yang dilakukan. Penelitian ini telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang strategi yang dilakukan dalam pemulihan pasca bencana, namun terdapat beberapa keterbatasan. Penelitian ini lebih fokus tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan tanah longsor. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi ini belum selesai dilakukan, sehingga masyarakat yang terdampak masih harus menunggu hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai. Harapannya, penelitian selanjutnya dapat mengkaji tentang dampak rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh BPBD setelah semua proses berjalan sampai akhir.

6.2 Saran

Menurut hasil temuan dan analisis data terkait Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pemulihan Pasca Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, berikut beberapa saran yang peneliti berikan:

1. Membuat kajian risiko bencana (KRB) banjir dan tanah longsor sehingga ketika bencana yang sama terjadi di kemudian hari dapat lebih mudah memahami, menganalisis, dan memahami pembagian tugas.
2. Perlunya peningkatan kapasitas kepada sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.
3. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih menguatkan

koordinasi dengan stakeholder mengenai persyaratan bantuan stimulan rumah, agar pencairan dana bisa lebih cepat keluar.

4. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan harus transparansi dalam penggunaan dana bantuan untuk menghindari penyalahgunaan.
5. Dalam pelaksanaan pemulihan bencana lakukan pemantauan berkala untuk memastikan semua langkah-langkah berjalan sesuai rencana/aturan.

